

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuatkan Akta Jual Beli tanah (AJB) sebagai bukti kepemilikannya. AJB dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dipedesaan masih minim PPAT, maka dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yaitu Camat. Setelah AJB jadi, AJB harus didaftarkan menjadi Sertifikat Tanah di Kantor BPN agar kekuatan hukumnya lebih kuat. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Proses Peralihan Hak Atas Tanah dengan alas hak jual beli oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) di Kantor BPN Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview/wawancara dan kuesioner. Dengan fokus penelitian Masyarakat Kecamatan Larangan, Kantor Kecamatan Larangan dan Kantor BPN Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Setelah AJB telah dibuatkan oleh Camat, AJB tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat tanah. dengan 2 cara yaitu pendaftaran mandiri (sporadic) datang ke Kantor BPN langsung dan pendaftaran massal (sistematis) mengikuti program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Pemerintah menyarankan masyarakat untuk mendaftarkan AJB menjadi sertifikat tanah agar kepastian hukumnya lebih kuat. (2) Hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan AJB dan sertifikat tanah adalah karena stigma masyarakat tentang prosesnya berbelit dan lambat serta biayanya yang mahal.

Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Akta Jual Beli Tanah (AJB), Camat

ABSTRACT

The transfer of land rights through the sale and purchase must be made a Deed of Sale and Purchase of land (AJB) as proof of ownership. AJB is made by the Land Deed Office (PPAT), but in rural areas there is still minimal PPAT, it can be done by the Office of The Provisional Land Deed Maker (PPATS) namely Camat. After AJB is finished, AJB must be registered as a Land Certificate at the BPN Office in order to strengthen its legal force. The purpose of this thesis research is to know the Process of Transfer of Land Rights with the basis of buying and selling rights by the District Head as the Land Deed Official (PPATS) in the Office of BPN Brebes Regency.

The research method used is juridical-sociological. Data collection techniques used are interviews and questionnaires. With the focus of research on The People of Prohibition Subdistrict, The Office of The Prohibition Subdistrict and the Office of BPN Brebes.

Based on the results of the research, the following conclusions were obtained: (1) After the AJB has been made by the sub-district head, the AJB must be registered at the Land Office to make a land certificate. in 2 ways, namely self-registration (sporadic) coming to the BPN office directly and mass registration (systematic) following the PTSL program (complete systematic land registration). The government advises the community to register AJB as a land certificate so that legal certainty is stronger. (2) The obstacles that occurred in the process of making AJB and land certificates were due to the community's stigma about the complicated and slow process and high costs.

Keyword: *Transferring Of Land Rights, A Land Sale & Purchase Certificate (AJB), Subdistrict Head*